

Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang (Studi Kelompok Tani Harapan Kona)

Theresa Ratu Rosalinda Anut^{1*}, Jeni Jacoba Therik², Rouwland Alberto Benyamin³,
Ardy Yosafat Pandie⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: indahanut@gmail.com¹, jeny.therik@staf.undana.ac.id², rouwland.benyamin@staf.undana.ac.id³,
ardy.pandie@staf.undana.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: indahanut@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of subsidized fertilizer policy in Tunfeu Village, Nekamese District, Kupang Regency, focusing on the Harapan Kona Farmer Group. The research employs a qualitative descriptive approach using a case study method to obtain an in-depth understanding of policy implementation at the local level. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, involving key stakeholders such as government officials, agricultural extension workers, distributors, retailers, and farmers. The analysis is based on Edward III's policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the subsidized fertilizer policy has not been fully effective. Communication among stakeholders is not yet consistent, particularly regarding distribution schedules, leading to uncertainty among farmers. Resource availability, although generally adequate, is constrained by distribution delays and limited infrastructure. The disposition of implementers shows a relatively positive commitment; however, it has not been fully responsive to field constraints. Meanwhile, the bureaucratic structure is formally well-defined but tends to be complex, resulting in inefficiencies in the distribution process. These findings suggest that the effectiveness of policy implementation is influenced by the interdependence of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Therefore, improving communication systems, strengthening coordination among stakeholders, and simplifying distribution mechanisms are necessary to enhance the effectiveness and accuracy of subsidized fertilizer distribution.*

Keywords: *Agricultural Policy; Edward III Model; Farmer Group; Policy Implementation; Subsidized Fertilizer.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, dengan fokus pada Kelompok Tani Harapan Kona. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan informan utama seperti pemerintah daerah, penyuluh pertanian, distributor, pengecer, dan petani. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal. Aspek komunikasi belum konsisten, terutama terkait jadwal distribusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian di tingkat petani. Sumber daya yang tersedia secara umum cukup, namun masih menghadapi kendala pada ketepatan waktu distribusi dan keterbatasan infrastruktur. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik, tetapi belum sepenuhnya responsif terhadap kendala di lapangan. Sementara itu, struktur birokrasi telah jelas secara administratif, namun kompleksitas rantai distribusi menyebabkan proses menjadi kurang efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem komunikasi, peningkatan koordinasi antar pelaksana, serta penyederhanaan mekanisme distribusi agar kebijakan pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kebijakan Pertanian; Kelompok Petani; Model Edward III; Pupuk Bersubsidi.

1. LATAR BELAKANG

Pupuk merupakan input strategis dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, serta daya saing hasil pertanian. Oleh karena itu, kebijakan subsidi pupuk menjadi instrumen vital pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1969, kebijakan subsidi pupuk di Indonesia terus mengalami penyesuaian, namun tetap berorientasi pada peningkatan produksi pangan melalui mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET) (Kariyasa et al., 2004; Susila, 2016; Syafa'at et al., 2021;). Kebijakan ini diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 yang menekankan prinsip penyaluran pupuk bersubsidi secara tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, mutu, harga, dan sasaran.

Secara nasional, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi yang cukup besar, seperti pada tahun 2023 dengan realisasi penyaluran mencapai 6,19 juta ton serta alokasi tahun 2024 sebesar 9,95 juta ton yang terdiri dari pupuk Urea, NPK, NPK formula khusus, dan pupuk organik. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa permasalahan distribusi pupuk bersubsidi masih sering terjadi, terutama terkait keterlambatan penyaluran, ketidaktepatan sasaran, serta penjualan di atas HET (Adolph, 2016; Anisa & Adnan, 2021). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi kebijakan dan implementasi di lapangan.

Permasalahan implementasi tersebut juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana distribusi pupuk bersubsidi sering menghadapi kendala seperti keterlambatan distribusi, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya sistem informasi pupuk yang terintegrasi (Perpres, 2024). Kondisi geografis yang menantang serta keterbatasan infrastruktur turut memperburuk efektivitas distribusi. Hal ini berdampak langsung pada petani, terutama dalam hal ketepatan waktu pemupukan yang sangat menentukan produktivitas tanaman.

Di tingkat Kabupaten Kupang, distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Pertanian, distributor resmi, dan pengecer di tingkat kecamatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti keterlambatan distribusi akibat pengumpulan RDKK yang tidak tepat waktu, praktik penjualan di atas HET, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem digital seperti iPubers. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola distribusi pupuk bersubsidi, baik dari aspek perencanaan, koordinasi, maupun pengawasan.

Fenomena tersebut secara nyata terjadi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani lahan kering. Hasil observasi menunjukkan bahwa keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi pada musim tanam 2024 menyebabkan pupuk yang seharusnya tersedia pada awal musim tanam (Januari) baru diterima pada bulan Maret. Keterlambatan ini berdampak pada terganggunya proses pemupukan pada fase awal pertumbuhan tanaman, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya ketidaksesuaian antara rencana kebutuhan pupuk dan realisasi penyaluran, di mana dalam tiga tahun terakhir terjadi kekurangan pupuk yang cukup signifikan pada kelompok tani.

Dampak dari permasalahan distribusi tersebut tercermin pada penurunan produktivitas pertanian, khususnya pada komoditas padi dan jagung yang mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Penurunan ini diduga kuat berkaitan dengan keterlambatan dan keterbatasan pupuk bersubsidi yang diterima petani, sehingga pemupukan tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, kondisi ini memaksa petani untuk menggunakan pupuk non-subsidi dengan harga lebih tinggi atau mengurangi dosis pemupukan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan hasil produksi.

Permasalahan distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh aspek implementasi kebijakan yang belum optimal. Menurut Saragih (2021), keterlambatan distribusi pupuk disebabkan oleh panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya pengawasan, sedangkan Rachman dan Suwandi (2020) menekankan bahwa ketidaktepatan waktu distribusi dapat menyebabkan penggunaan pupuk yang tidak efisien dan berdampak pada kualitas tanah dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan subsidi pupuk sangat bergantung pada efektivitas implementasinya di lapangan.

Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan dari Edward III menjadi relevan untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan distribusi pupuk bersubsidi. Teori ini menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat kelompok tani.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, dengan studi kasus pada Kelompok Tani Harapan Kona. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami permasalahan implementasi kebijakan

pupuk bersubsidi serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan tata kelola distribusi pupuk agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis pemerintah yang digunakan untuk merespons dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik secara terencana. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan maupun tidak dilakukan, sehingga kebijakan tidak hanya berbentuk tindakan nyata, tetapi juga mencerminkan prioritas dan pilihan politik pemerintah (Inu Kencana dalam Mazli, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi normatif sekaligus praktis dalam mengarahkan pembangunan.

Lebih lanjut, Dunn (2018) memandang kebijakan publik sebagai hasil dari proses kompleks yang melibatkan interaksi berbagai aktor, kepentingan, serta pertimbangan rasional dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak bersifat linear, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan karena menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan hasil yang diharapkan. Sabatier (1986) mengemukakan dua pendekatan utama, yaitu top-down yang menekankan kontrol dari pemerintah pusat, serta bottom-up yang menekankan peran aktor lokal dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan konteks lokal.

Dye (1981) menambahkan bahwa implementasi kebijakan dapat dipahami melalui model linier dan interaktif. Model linier melihat implementasi sebagai tahap teknis yang bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, sedangkan model interaktif menekankan bahwa implementasi merupakan proses dinamis yang melibatkan negosiasi dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan aktor kebijakan dalam mengelola interaksi, konflik kepentingan, serta adaptasi terhadap kondisi nyata di lapangan.

Model Implementasi Kebijakan Edward III

Model implementasi kebijakan Edward III merupakan salah satu kerangka analisis yang paling komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model ini menekankan empat variabel utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama, komunikasi menjadi faktor fundamental karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi yang tidak jelas atau tidak konsisten berpotensi menimbulkan distorsi kebijakan, sehingga implementasi tidak berjalan sesuai tujuan. Kedua, sumber daya mencakup aspek manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi prasyarat penting, namun tidak menjamin keberhasilan jika tidak dikelola secara efektif. Ketiga, disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan integritas pelaksana kebijakan. Variabel ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara nilai dan tujuan kebijakan dengan sikap para implementator. Terakhir atau keempat, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi, pembagian tugas, serta prosedur operasional yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur yang terlalu kompleks atau tidak efisien dapat menghambat kelancaran implementasi.

Keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga melibatkan aspek organisasi, perilaku, dan sistem administrasi secara menyeluruh.

Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani guna meningkatkan produktivitas pertanian (Kementerian Pertanian RI, 2024). Kebijakan ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di negara agraris seperti Indonesia.

Namun, efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi sangat bergantung pada sistem distribusi yang mampu menjamin prinsip tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, mutu, harga, dan sasaran. Ketidaktepatan dalam salah satu aspek tersebut dapat menyebabkan distorsi kebijakan, seperti kelangkaan pupuk, kenaikan harga di tingkat petani, serta penurunan produktivitas pertanian.

Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan institusi lokal yang memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan pertanian, termasuk distribusi pupuk bersubsidi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 Tahun 2007, kelompok tani merupakan organisasi nonformal yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi, dan tujuan untuk meningkatkan usaha tani.

Secara fungsional, kelompok tani berperan sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan penguatan kapasitas petani. Selain itu, kelompok tani juga menjadi penghubung antara pemerintah dan petani dalam pelaksanaan program pertanian. Dengan demikian, keberadaan kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di tingkat lokal. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas sosial secara komprehensif dari perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus pada Kelompok Tani Harapan Kona di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, sebagai lokasi yang merepresentasikan permasalahan distribusi pupuk bersubsidi.

Fokus penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi dianalisis melalui kejelasan dan alur penyampaian informasi kebijakan, sumber daya dilihat dari ketersediaan tenaga, fasilitas, dan data pendukung, disposisi berkaitan dengan komitmen serta sikap pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi dianalisis melalui mekanisme koordinasi dan prosedur operasional dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti data alokasi pupuk, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), laporan distribusi, serta regulasi terkait. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Informan meliputi unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh pertanian, distributor, pengecer, serta kelompok tani sebagai penerima kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses distribusi pupuk di lapangan, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam dari informan kunci, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip dan dokumen resmi yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Sugiyono, 2018). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi sistematis agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pola dan hubungan antar data.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data secara berulang hingga diperoleh informasi yang konsisten (Sugiyono, 2018; Sugiyono, 2019). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris di lapangan. Secara regulatif, kebijakan telah dirancang dengan prinsip enam tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, mutu, dan sasaran), namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pupuk bersubsidi telah berjalan secara berjenjang dari Dinas Pertanian Kabupaten Kupang kepada penyuluh, kemudian kepada kelompok tani. Informasi yang disampaikan meliputi alokasi pupuk, mekanisme penebusan, serta ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, dari hasil wawancara ditemukan bahwa aspek transmisi dan kejelasan informasi belum berjalan optimal.

Sebagian petani hanya memperoleh informasi ketika pupuk sudah tersedia, tanpa mengetahui jadwal distribusi secara pasti. Selain itu, perubahan jadwal dan kuota sering disampaikan secara mendadak, sehingga menimbulkan ketidakpastian di tingkat petani. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pada aspek kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) komunikasi, sebagaimana dikemukakan dalam model Edward III.

Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya partisipatif. Padahal, komunikasi yang efektif seharusnya mampu memastikan bahwa seluruh kelompok sasaran memahami kebijakan secara utuh dan tepat waktu. Dengan demikian, komunikasi menjadi faktor awal yang memengaruhi tahapan implementasi selanjutnya.

Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan sumber daya dasar telah terpenuhi, namun belum optimal dalam mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

Pertama, dari sisi sumber daya manusia, penyuluh pertanian memiliki peran yang cukup baik dalam mendampingi kelompok tani, terutama dalam penyusunan RDKK dan sosialisasi kebijakan. Namun, keterbatasan intensitas pendampingan menyebabkan tidak semua anggota kelompok memperoleh informasi secara merata.

Kedua, dari sisi fasilitas, sarana distribusi seperti transportasi dan gudang penyimpanan telah tersedia, tetapi masih terdapat kendala pada kapasitas penyimpanan dan kondisi infrastruktur jalan yang memengaruhi ketepatan waktu distribusi. Selain itu, sistem administrasi yang masih manual berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pencatatan data.

Ketiga, dari sisi pengelolaan data, penyusunan RDKK telah berjalan sesuai prosedur, namun masih ditemukan kendala pada partisipasi anggota kelompok dan ketepatan waktu pembaruan data. Hal ini berpotensi memengaruhi akurasi alokasi pupuk.

Keempat, terkait kesesuaian jumlah dan waktu distribusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitas pupuk relatif sesuai dengan RDKK, tetapi dari segi waktu masih sering terjadi keterlambatan distribusi. Kondisi ini berdampak langsung pada proses budidaya tanaman karena pemupukan tidak dapat dilakukan pada waktu yang optimal.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya tersedia, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dan koordinasi antar pelaksana kebijakan.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menunjukkan hasil yang relatif positif. Pengecer dan pelaksana lainnya pada umumnya memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan sesuai ketentuan, khususnya dalam menyalurkan pupuk berdasarkan data RDKK dan tidak melakukan penyimpangan distribusi.

Pengecer menunjukkan sikap responsif dengan segera mendistribusikan pupuk setelah stok tersedia serta menginformasikan kepada kelompok tani. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan.

Namun demikian, ketepatan waktu distribusi belum sepenuhnya optimal, bukan karena rendahnya komitmen pelaksana, tetapi lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti keterlambatan pasokan dari distributor. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi yang baik belum cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi jika tidak didukung oleh sistem distribusi yang efektif.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi menunjukkan pola yang hierarkis dan berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, PT Pupuk Indonesia, distributor, pengecer, hingga kelompok tani. Secara normatif, pembagian tugas dan kewenangan telah jelas, namun panjangnya rantai distribusi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi.

Koordinasi antar lembaga telah berjalan, namun masih bersifat situasional dan belum terstruktur secara sistematis. Komunikasi antar pelaksana lebih banyak dilakukan secara informal tanpa mekanisme koordinasi rutin. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi dan ketidaksinkronan jadwal distribusi.

Di sisi lain, prosedur pengajuan dan verifikasi RDKK telah berjalan sesuai ketentuan administratif. Namun, partisipasi anggota kelompok tani dalam proses verifikasi masih terbatas, sehingga transparansi dan pemahaman terhadap proses tersebut belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi secara formal telah berjalan, tetapi belum didukung oleh sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipatif.

Berdasarkan keempat variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Desa Tunfeu belum sepenuhnya efektif. Kelemahan utama terletak pada aspek komunikasi, ketepatan waktu distribusi, serta koordinasi antar pelaksana kebijakan. Meskipun sumber daya dasar tersedia dan disposisi pelaksana tergolong baik, faktor struktural dalam sistem distribusi masih menjadi hambatan utama.

Temuan ini memperkuat teori Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh keterkaitan antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketidakseimbangan pada salah satu variabel akan memengaruhi keseluruhan proses implementasi. Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di tingkat desa tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh lemahnya koordinasi dan sistem komunikasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem komunikasi yang lebih transparan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penyesuaian sistem distribusi dengan kebutuhan riil petani agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Desa Tunfeu belum berjalan optimal jika dilihat dari empat aspek utama menurut Edward III. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi sudah dilakukan, tetapi belum konsisten terutama terkait jadwal distribusi sehingga petani sering mengalami ketidakpastian. Dari sisi sumber daya, pelaksana telah menjalankan tugasnya, namun ketersediaan pupuk dan sistem distribusi belum sepenuhnya mendukung kebutuhan petani sesuai RDKK. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik, tetapi belum sepenuhnya responsif terhadap permasalahan di lapangan. Sementara itu, struktur birokrasi sudah jelas secara aturan, tetapi rantai distribusi yang panjang menyebabkan proses menjadi lambat dan kurang efisien. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala pada koordinasi, ketepatan waktu distribusi, dan keterpaduan antar pelaksana.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi, pemerintah perlu memperbaiki sistem komunikasi dengan memastikan informasi distribusi disampaikan secara jelas dan tepat waktu kepada petani. Selain itu, ketersediaan pupuk harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam RDKK dan didukung oleh sistem distribusi yang lebih baik. Pelaksana kebijakan juga perlu meningkatkan komitmen pelayanan yang lebih responsif dan transparan. Di sisi lain, perlu dilakukan penyederhanaan alur birokrasi serta penguatan koordinasi antar pihak agar distribusi pupuk dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan petani.

DAFTAR REFERENSI

- Adolph, B. (2016). Kebijakan subsidi pupuk dan implementasinya di sektor pertanian.
- Anisa, F., & Adnan. (2021). Subsidi pupuk pada sektor pertanian dan implikasinya terhadap produksi.
- Biro Hukum Kementerian Pertanian RI. (2024). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang tata kelola pupuk bersubsidi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jeharum, F., Nikolaus, S., & Nurwiana, I. (2023). Dinamika kelompok tani di Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. *Buletin Ilmiah IMPAS*, 24(1), 26–34. <https://doi.org/10.35508/impas.v24i1.11430>
- Kadji, J. (2015). Pembangunan masyarakat sebagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 31–42. <https://doi.org/10.26858/jiap.v5i1.1063>
- Kementerian Pertanian RI. (2007). *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman kelompok tani*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kementerian Pertanian RI. (2015). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Permentan/SR.130/12/2015 tentang harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kementerian Pertanian RI. (2021). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Ketut Kariyasa, M. Maulana, & Sudi Mardianto. (2004). Usulan tingkat subsidi dan harga eceran tertinggi (HET) yang relevan serta perbaikan pola pendistribusian pupuk di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 2(3), 277–287. <https://doi.org/10.21082/akp.v2n3.2004.277-287>
- Mazli, I. (2012). Konsep relasi politik dan birokrasi dalam kebijakan publik. *Seminar Nasional*, 51(1), 51.
- Nugroho, R. (2011). *Public policy* (Edisi revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rachman, B., & Suwandi. (2020). Dampak keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi terhadap produktivitas pertanian.
- Saragih, B. (2021). Distribusi pupuk bersubsidi di daerah terpencil dan tantangan implementasinya.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.

- Syafa'at, A., et al. (2021). Kebijakan pupuk bersubsidi dan pengaruhnya terhadap ketahanan pangan nasional.
- Wayan R. Susila. (2016). Kebijakan subsidi pupuk: Ditinjau kembali. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 25(2), 43–54. [Repository Kementerian Pertanian](#)
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.